UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Dinamika Perilaku Birokrasi terhadap Adopsi Kebijakan Satu Peta (Studi Kasus Kabupaten Kampar, Provinsi Riau)
Zaki Helmi, Prof. Dr. Ahmad Maryudi, S.Hut., M.For.; Prof. Dr.rer.nat. Muh Aris Marfai, S.Si., M.Sc.; Prof. Dr. Agus He
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INTISARI

Penelitian ini menganalisis mekanisme perilaku birokrasi dalam membentuk adopsi operasional Kebijakan Satu Peta di Kabupaten Kampar. Kebijakan Satu Peta dipahami bukan hanya sebagai kebijakan teknis integrasi data geospasial, tetapi juga sebagai proses transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang menuntut perubahan pemahaman, kapasitas teknis, koordinasi lintas OPD, dan pelembagaan praktik administrasi berbasis data spasial. Penelitian ini membedakan adopsi formal dan adopsi operasional. Adopsi formal merujuk pada penerimaan kebijakan melalui regulasi dan kelembagaan, sedangkan adopsi operasional merujuk pada proses ketika birokrasi memahami, menginternalisasi, menggunakan, dan mengintegrasikan kebijakan ke dalam rutinitas organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis melalui transkripsi, familiarisasi data, pengodean semantik secara deduktif, pengembangan kode laten, peninjauan dan penetapan tema, serta interpretasi teoretik. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi, member checking, audit trail, dan refleksivitas peneliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku birokrasi bekerja sebagai mekanisme mediasi antara adopsi formal dan adopsi operasional Kebijakan Satu Peta. Mekanisme tersebut tampak melalui dimensi kognitif, kapasitas, institusional, dan interaksi organisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adopsi formal di Kabupaten Kampar belum otomatis menghasilkan adopsi operasional yang merata. Perilaku birokrasi bukan satu-satunya determinan, tetapi merupakan mekanisme mediasi utama yang menjelaskan bagaimana regulasi, teknologi, data, kelembagaan, dan koordinasi diterjemahkan ke dalam praktik administrasi sehari-hari. Temuan kritis penelitian juga mengidentifikasi ketakutan birokrasi (bureaucratic fear) sebagai mekanisme psikologis lintas dimensi ketika aparatur menghadapi intimidasi, tekanan kepentingan usaha, dan intervensi politik dalam validasi tata ruang. Ketakutan tersebut membatasi diskresi profesional, sedangkan pengawasan KPK dan BPK melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) membentuk lingkungan pemberi kewenangan (authorizing environment) yang memperkuat perlindungan administratif dan keberanian birokrat bertindak berdasarkan data. Dimensi kapasitas muncul sebagai pengungkit paling dominan karena menentukan apakah pemahaman birokrasi dapat diterjemahkan menjadi tindakan teknis. Namun, keberlanjutan kapasitas bergantung pada pelembagaan melalui SOP, regenerasi operator, perlindungan administratif, serta kepemimpinan yang tidak terikat pada figur. Geoportal Kabupaten Kampar masih berada pada tahap transisi dari media berbagi informasi menuju instrumen interoperabilitas dan pengambilan keputusan.

Kata Kunci: Kebijakan Satu Peta, Perilaku Birokrasi, Adopsi Operasional, Ketakutan Birokrasi

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Dinamika Perilaku Birokrasi terhadap Adopsi Kebijakan Satu Peta (Studi Kasus Kabupaten Kampar, Provinsi Riau)
Zaki Helmi, Prof. Dr. Ahmad Maryudi, S.Hut., M.For.; Prof. Dr.rer.nat. Muh Aris Marfai, S.Si., M.Sc.; Prof. Dr. Agus He
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRACT

This study analyzes the mechanisms of bureaucratic behavior in shaping the operational adoption of the One Map Policy in Kampar Regency. The One Map Policy is understood not only as a technical policy for geospatial data integration, but also as a transformation of local governance that requires changes in bureaucratic understanding, technical capacity, inter-agency coordination, and the institutionalization of spatial data-based administrative practices. This study distinguishes formal adoption from operational adoption. Formal adoption refers to policy acceptance through regulations and institutional arrangements, while operational adoption refers to the process through which bureaucracy understands, internalizes, uses, and integrates the policy into organizational routines. This research employs a qualitative case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document review, and were analyzed through transcription, data familiarization, deductive semantic coding, latent code development, theme review and definition, and theoretical interpretation. Data trustworthiness was strengthened through triangulation, member checking, audit trail, and researcher reflexivity. The findings show that bureaucratic behavior operates as a mediating mechanism between formal and operational adoption of the One Map Policy. This mechanism is reflected in four dimensions: cognitive, capacity, institutional, and organizational interaction. The study concludes that formal adoption in Kampar Regency has not automatically produced evenly distributed operational adoption. Bureaucratic behavior is not the sole determinant, but a central mediating mechanism that explains how regulations, technology, data, institutional arrangements, and coordination are translated into everyday administrative practices. A critical finding identifies bureaucratic fear as a cross-cutting psychological mechanism when officials face intimidation, business interests, and political intervention in spatial validation. Such fear constrains professional discretion, whereas oversight by the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Audit Board of Indonesia (BPK) through the National Strategy for Corruption Prevention (Stranas PK) creates an authorizing environment that strengthens administrative protection and officials' capacity to act on evidence. The capacity dimension emerges as the most dominant lever because it determines whether bureaucratic understanding can be translated into technical action. Its sustainability, however, depends on institutionalization through standard operating procedures, operator succession, administrative protection, and leadership arrangements that do not rely on individual figures. Kampar Regency's geoportal remains in transition from an information-sharing medium toward an interoperability and decision-making instrument.

***Keywords**: One Map Policy, Bureaucratic Behavior, Operational Adoption*, Bureaucratic Fear